

BAB I

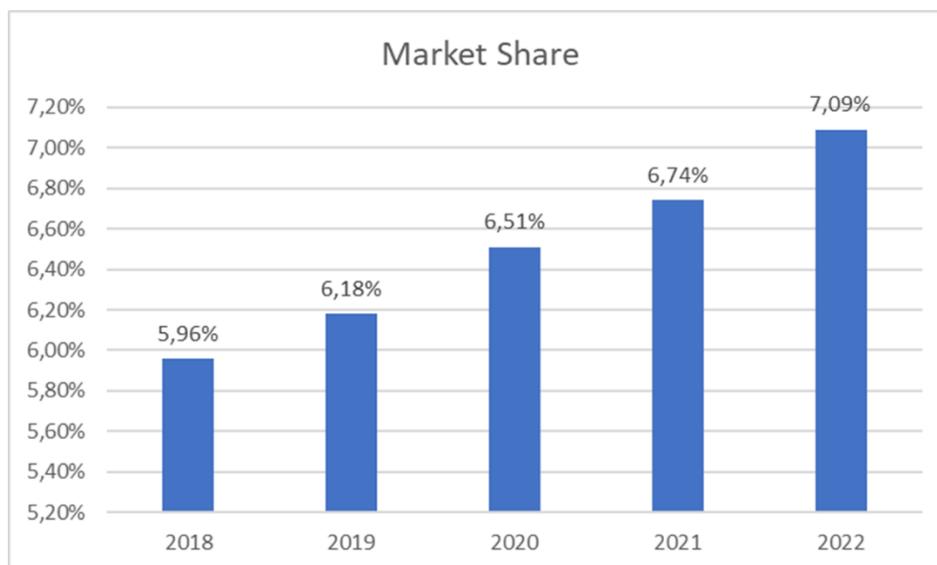
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian sebuah negara, industri perbankan mempunyai peranan esensial dalam berjalannya perekonomian. Perbankan mempunyai beberapa tugas, salah satunya melakukan penghimpunan dana dari nasabah atau masyarakat menjadi tabungan dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam upaya menaikkan kualitas hidup. Secara umum, ada jenis perbankan yang terbagi menjadi dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Bank syariah mengikuti prinsip Islam dalam operasionalnya sehingga melarang hal-hal yang melanggar prinsip Islam, seperti penetapan bunga (riba) yang lazim terjadi pada perbankan konvensional. Terdapat perbedaan dibandingkan bank konvensional yang menerapkan bunga dalam kegiatan operasionalnya. Kita dapat mengetahui kelanjutan perbankan syariah di Indonesia yang terlihat dari bermunculannya bank syariah dalam beberapa tahun terakhir melalui grafik pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1. 1
Market Share Perbankan Syariah Periode 2018-2022



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2018-2022, diolah

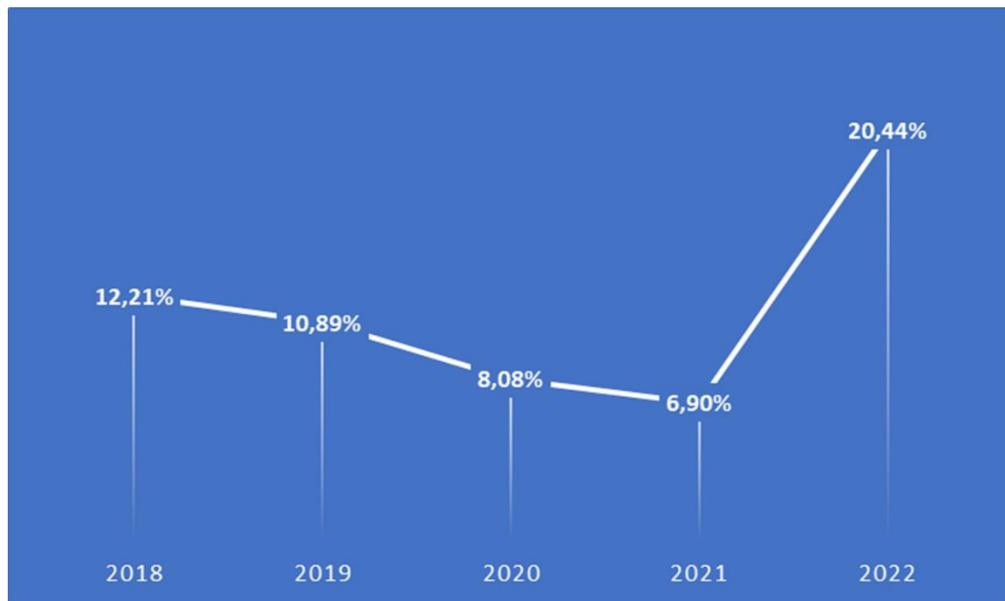
Melalui Gambar 1.1 di atas, data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2022, memperlihatkan adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun secara umum pada pangsa pasar bank syariah. Bahkan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah tidak mengalami penurunan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021 ke tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 0,35%, dimana pada tahun 2021 sebesar 6,74% dan pada tahun 2022 sebesar 7,09%. Meningkatnya pangsa pasar bank syariah menunjukkan bahwa bank syariah dapat menarik nasabah baru dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah juga meningkat.

Bank syariah juga berfungsi sebagai perantara, dana yang berasal pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk dihimpun, dengan tujuan untuk selanjutnya mengalokasikan dana tersebut untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Dalam perbankan syariah, pengalokasian

dana dilakukan melalui produk pembiayaan berbagai akad yang ditawarkan bank syariah. Produk pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah memiliki perbedaan dibandingkan kredit yang dikeluarkan bank konvensional karena tidak dikenakan bunga (riba).

Gambar 1. 2

Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2018-2022



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2018-2022, diolah

Melalui Gambar 1.2 di atas, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah mengalami tren penurunan selama tahun 2018-2021. Penurunan yang terjadi disebabkan masih berfokus pada penguatan yang dilakukan industri perbankan dalam perbaikan kualitas pembiayaan. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 13,54%, pertumbuhan pembiayaan tahun 2021 sebesar 6,90% mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 20,44%. Kenaikan ini dapat terjadi karena membaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2022 pasca pandemi COVID-19.

Bersumber dari data laporan keuangan perbankan syariah oleh OJK, pada tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat 13 bank umum syariah (BUS) di Indonesia. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau dikenal sebagai BTPN Syariah menjadi salah satu dari 13 bank umum syariah yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ditetapkan sebagai bank umum syariah (BUS) pada tahun 2014 menjadikan BTPN Syariah sebagai lembaga mandiri yang tak terikat dengan BTPN dalam urusan operasional perbankan syariah.

Dalam menyalurkan dananya, perbankan syariah memerlukan sumber dana dari dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga (DPK) bersumber dari pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk nantinya dihimpun oleh bank syariah untuk nantinya disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang memerlukan dana. Secara umum, produk yang dikeluarkan oleh bank dalam penghimpunan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih adalah deposito tabungan, dan giro.

Tabel 1. 1

Alokasi Penyaluran Pembiayaan BUS Tahun 2022 (Dalam Juta Rp dan persen)

Bank	Pembiayaan	DPK	Alokasi
Bank Victoria Syariah	Rp 622.952	Rp 816.420	76%
BJB Syariah	Rp 7.441.226	Rp 9.119.577	82%
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	Rp 8.725.028	Rp 9.780.184	89%
Bank Aladin Syariah	Rp 1.376.864	Rp 794.649	173%
Bank Mega Syariah	Rp 7.277.489	Rp 13.551.787	54%
Bank Panin Dubai Syariah	Rp 10.353.072	Rp 10.638.434	97%
BCA Syariah	Rp 7.576.800	Rp 9.481.600	80%
BPD Riau Kepri Syariah	Rp 19.600.897	Rp 26.973.705	73%
Bank Aceh Syariah	Rp 17.334.052	Rp 22.976.036	75%
Bank Muamalat Indonesia	Rp 18.821.000	Rp 46.143.000	41%
Bank Syariah Bukopin	Rp 5.168.000	Rp 5.589.000	92%
BTPN Syariah	Rp 11.500.000	Rp 12.049.255	95%
Bank Syariah Indonesia	Rp 207.704.856	Rp 261.490.981	79%

Sumber : Laporan Keuangan Bank, 2022, diolah

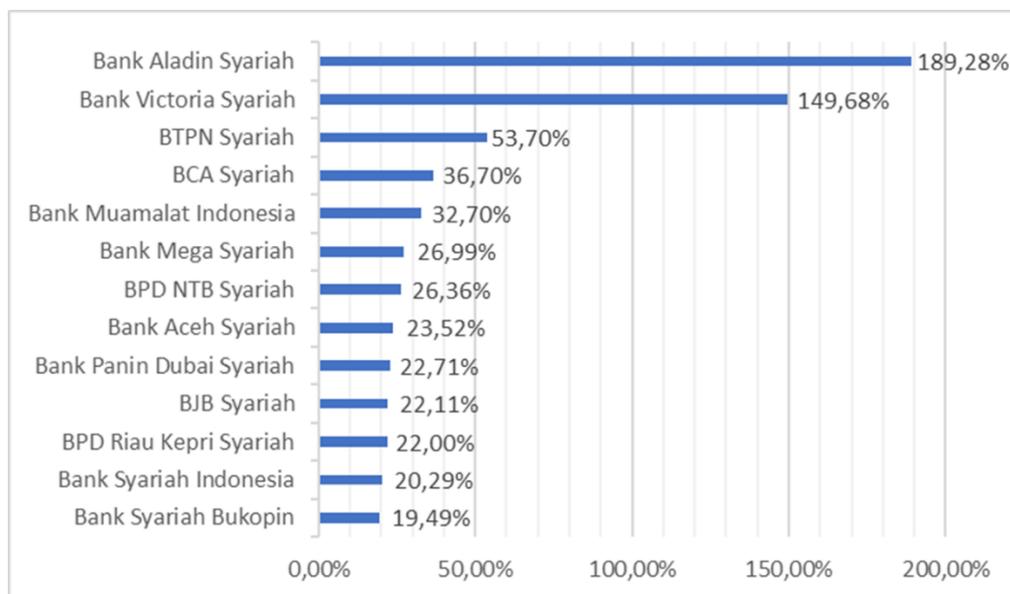
Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui nilai pembiayaan BTPN Syariah adalah sebesar 11,5 triliun rupiah dan nilai pembiayaan tersebut merupakan yang terbesar kelima dari 13 BUS. Nilai dana pihak ketiga dari BTPN Syariah adalah sebesar 12,05 triliun rupiah dan nilai dana pihak ketiga tersebut masih kalah jauh dari 5 BUS seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, BPD Riau Kepri Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank Mega Syariah. Namun, jika melihat dari alokasi dana pihak ketiga untuk penyaluran pembiayaan maka BTPN Syariah termasuk dalam 3 besar alokasi dana pihak ketiga untuk penyaluran pembiayaan dengan persentase sebesar 95% dan hanya lebih kecil dari Bank Panin Dubai Syariah dengan persentase 97% dan Bank Aladin Syariah dengan persentase 173%. Hal ini membuktikan bahwa nilai pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang

telah dihimpun oleh BTPN Syariah pada tahun 2022 bukan termasuk tiga besar, namun dari segi persentase alokasi dana pihak ketiga untuk penyaluran pembiayaan termasuk dalam tiga besar diantara bank umum syariah (BUS) di Indonesia.

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam operasionalnya juga berkaitan dengan risiko, tidak terkecuali dalam menyalurkan pembiayaan oleh BTPN Syariah juga perlu memperhitungkan bagaimana kesediaan modal yang ada. Maka bank mempersiapkan modal dengan nilai yang sesuai dengan tujuan meredam kerugian dan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Penggunaan rasio dalam mengukur kecukupan modal bank yang disebut dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Otoritas jasa keuangan (OJK) telah menetapkan bahwa rasio CAR minimum adalah sebesar 8% berdasarkan profil risiko perbankan.

Gambar 1. 3

Rasio Kecukupan Modal BUS Tahun 2022 (Dalam persen)



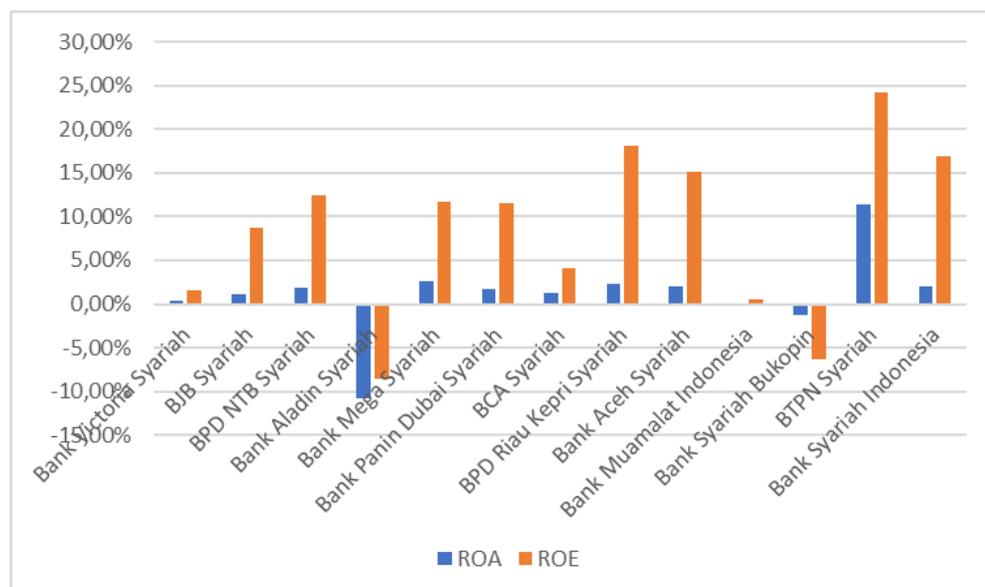
Sumber : Laporan Keuangan Bank, 2022, diolah

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, menjelaskan bahwa secara keseluruhan BUS memiliki rasio kecukupan modal (CAR) diatas 8% yang menunjukkan bahwa kemampuan BUS dalam menahan kerugian, pengelolaan risiko, dan kondisi keuangannya berada pada tingkat yang baik. Nilai CAR dari BTPN Syariah menunjukkan persentase sebesar 53,70% berada pada peringkat ketiga persentase CAR terbesar diantara 13 BUS yang terdaftar pada tahun 2022.

BTPN Syariah sebagai salah satu bank yang melakukan penyaluran pembiayaan menjadi salah bentuk yang digunakan dalam memperoleh profitabilitas. Penggunaan penanda yang umum guna melihat profitabilitas bank yaitu *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Assets* (ROA). ROA dan ROE sama-sama menakar kapabilitas bank dalam mendapatkan keuntungan, namun yang menjadi perbedaan adalah ROA mengoptimalkan penggunaan aset sedangkan ROE mengoptimalkan penggunaan modal.

Gambar 1. 4

ROA dan ROE BUS Tahun 2022 (Dalam persen)



Sumber : Laporan Keuangan Bank, 2022, diolah

Berdasarkan gambar 1.4 di atas, memperlihatkan bahwa diagram batang berwarna biru mewakili *return on assets* (ROA) dan diagram batang berwarna oranye mewakili *return on equity* (ROE). Pada BTPN Syariah menunjukkan persentase ROA dan ROE tertinggi dibandingkan BUS lainnya dengan persentase ROA lebih dari 10% dan ROE mendekati 25% yang masing-masing memiliki jarak yang jauh dengan persentase ROA dan ROE dari BUS lainnya sehingga kapabilitas BTPN Syariah dalam mendapatkan profitabilitas dapat disebut lebih baik jika dibandingkan BUS lainnya.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Gumay Citra dan Suman (2022) dan Susilowati dan Sistiani (2021) tentang pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia yang dipengaruhi oleh determinan terkait dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dalam mempengaruhi pembiayaan bank syariah. Kenaikan dana pihak ketiga (DPK) memberikan pengaruh dalam besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dan laba yang dihasilkan. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syu'la et al., (2021) memberikan hasil terkait dana pihak ketiga (DPK) tidak terdapat pengaruh terhadap pembiayaan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syu'la et al., (2021) dengan hasil penelitian ialah *capital adequacy ratio* (CAR) ditunjukkan mempunyai pengaruh negatif dalam mempengaruhi pembiayaan sehingga saat CAR mengalami kenaikan akan berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pembiayaan. Penelitian dengan hasil berbeda oleh Mutiara et al. (2023) dengan hasil yang memperlihatkan tidak adanya pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) dalam mempengaruhi pembiayaan.

Hasil pada penelitian terdahulu mengenai pembiayaan yang dipengaruhi oleh *return on assets* (ROA) oleh Syu'la et al., (2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antar kedua variabel tersebut. Apabila ROA mengalami kenaikan maka berdampak kepada tanda naiknya penyaluran pembiayaan. Namun, penelitian dengan hasil yang bertolak belakang oleh Astuti dan Artha (2023) tidak menunjukkan adanya pengaruh pada *return on assets* (ROA) dengan pembiayaan.

Mengacu pada hasil yang telah didapatkan dalam penelitian terdahulu oleh Handoko et al. (2022) memperlihatkan variabel *Return on Equity* (ROE) memiliki pengaruh pada pembiayaan. Namun, dalam penelitian terdahulu oleh Mutiara et al. (2023) dengan hasil bahwa pada variabel *Return on Equity* (ROE) tidak ditemukan pengaruh pada pembiayaan.

Berdasarkan berbagai fenomena yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu penelitian ini berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan pada BTPN Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan dalam bagian latar belakang sebelumnya, dalam penelitian ini dapat menunjukkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan pada BTPN Syariah ?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan pada BTPN Syariah ?

3. Apakah *Return On Assets* (ROA) memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan pada BTPN Syariah ?
4. Apakah *Return On Equity* (ROE) memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan pada BTPN Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pemaparan dalam bagian latar belakang serta rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini dapat ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan pada BTPN Syariah.
2. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Rasio* (CAR) terhadap Pembiayaan pada BTPN Syariah.
3. Mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan pada BTPN Syariah.
4. Mengetahui pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan pada BTPN Syariah.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Data dalam penelitian ini mencakup jenis data runtun waktu atau *time series* triwulanan yang dikeluarkan oleh BTPN Syariah.
2. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan sedangkan untuk variabel independen menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), serta *Return On Equity* (ROE).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Referensi pengetahuan dan wawasan perbankan syariah dapat ditambahkan bagi para peneliti yang tertarik mempelajari topik penelitian terkait.

2. Bagi Lembaga

Hasil temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam aspek untuk mempertimbangkan kebijakan untuk memperkuat pembiayaan.

3. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga lembaga pendidikan terutama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta menjadi tambahan literatur ilmu pengetahuan bagi perpustakaan.